

Evaluasi Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Standar Kesehatan Fiskal Daerah: Studi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025

Juniyanti Tuarita¹, Abdulatip Banda², Saiful³

^{1,2,3}Universitas Werisar, Sorong Selatan, Indonesia

Email: junutuarita@gmail.com¹, bandaunsar@gmail.com², saifulmukmin749@gmail.com³

Corresponding Email : 232621230.julehah@uinbanten.ac.id

Received : 16-12-2025

Revised : 18-12-2025

Accepted : 21-12-2025



This is Open Access article under the CC-BY-SA License

((<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

Abstrak : Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sorong Selatan. Proporsi belanja pegawai yang terlalu tinggi sering kali berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada *standar kesehatan fiskal* yang ditetapkan Kementerian Keuangan, idealnya belanja pegawai tidak melebihi batas tertentu agar kapasitas fiskal tetap sehat dan berkelanjutan. Namun, dinamika kebutuhan birokrasi, penataan kelembagaan, dan peningkatan jumlah pegawai masih menjadi tantangan yang memengaruhi proporsi belanja pegawai di daerah. **Penelitian ini bertujuan** untuk mengevaluasi proporsi belanja pegawai terhadap standar kesehatan fiskal pemerintah daerah pada APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio keuangan daerah, dokumentasi APBD, dan perbandingan terhadap indikator kesehatan fiskal yang berlaku. **Kebaruan penelitian** (*novelty*) terletak pada fokus evaluasi terhadap APBD terbaru (Tahun Anggaran 2025) serta pemetaan implikasinya terhadap ruang fiskal jangka menengah daerah. Penelitian ini menawarkan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi penataan belanja yang lebih efisien, termasuk penguatan *value for money*, pengendalian belanja pegawai, dan optimalisasi belanja produktif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai masih berada pada kategori kurang sehat, sehingga berdampak pada kapasitas fiskal daerah. **Penelitian ini menyimpulkan** perlunya

penguatan kebijakan pengendalian belanja pegawai dan optimalisasi komposisi belanja yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kata kunci: Belanja Pegawai; Kesehatan Fiskal; APBD; Evaluasi Fiskal; Sorong Selatan.

Abstract: Employee expenditure constitutes the largest component of regional budgets across Indonesia, including South Sorong Regency. A high proportion of employee spending often limits fiscal space needed for development programs, public service improvement, and community welfare enhancement. According to the fiscal health standards issued by the Ministry of Finance, employee expenditure should remain within an ideal threshold to maintain a healthy and sustainable fiscal capacity. However, bureaucratic demands, institutional restructuring, and the increasing number of civil servants continue to challenge the optimization of regional spending structures. **This study aims** to evaluate the proportion of employee expenditure in relation to regional fiscal health standards in the South Sorong Regency Regional Budget (APBD) for the 2025 fiscal year. The study employs a descriptive quantitative approach using regional financial ratio analysis, budget document reviews, and comparisons with national fiscal health indicators. **The novelty** of this study lies in its focus on evaluating the most recent budget year (2025) and mapping its implications for the region's medium-term fiscal space. This research provides practical contributions in the form of strategic recommendations for more efficient expenditure management, including strengthening value for money principles, controlling employee expenditure, and optimizing productive spending. **The results indicate** that the proportion of employee expenditure is categorized as (less healthy), which affects the region's fiscal capacity. **The study concludes** that stricter expenditure control and a healthier budget composition are required to support sustainable fiscal performance.

Keywords: Employee Expenditure; Fiscal Health; Regional Budget, Fiscal Evaluation, South Sorong.

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen strategis untuk menilai kemampuan daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Salah satu komponen utama dalam APBD adalah Belanja Pegawai, yang pada banyak daerah di Indonesia menempati proporsi terbesar dibandingkan jenis belanja lainnya. Tingginya proporsi belanja pegawai sering kali dikritisi karena berpotensi mengurangi ruang fiskal (*fiscal space*) untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang bersifat produktif.

Menurut Kementerian Keuangan, salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal daerah adalah kesesuaian struktur belanja, termasuk batas ideal proporsi Belanja Pegawai yang berkisar antara 30–35 persen dari total belanja (Kemenkeu, 2023). Proporsi belanja pegawai yang melebihi standar tersebut dapat menunjukkan ketidakseimbangan fiskal, memicu risiko ketidakmampuan daerah dalam membiayai layanan dasar, serta menghambat pencapaian target pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell (2015) bahwa analisis deskriptif diperlukan untuk menggambarkan

fakta masalah sebagaimana adanya, sehingga evaluasi proporsi belanja pegawai harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil suatu daerah.

Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang dan memiliki kebutuhan pembangunan yang tinggi, terutama dalam penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan ruang bagi program-program tersebut menjadi faktor determinan keberhasilan pembangunan. Jika proporsi Belanja Pegawai dalam APBD 2025 terlalu besar, maka potensi penurunan kualitas belanja publik (*public spending quality*) menjadi ancaman yang harus diantisipasi.

Secara teoritis, analisis mengenai proporsi Belanja Pegawai dapat dikaji melalui kerangka **fiscal health**, *fiscal sustainability*, dan *public expenditure efficiency*. Mikesell (2014) menekankan bahwa kesehatan fiskal ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk membelanjakan anggaran secara seimbang antara kebutuhan operasional dan belanja publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, teori *fiscal sustainability* menjelaskan bahwa struktur belanja yang tidak proporsional dapat mengancam keberlanjutan fiskal jangka panjang (Auerbach & Gale, 2019). Dengan demikian, pembahasan mengenai proporsi belanja pegawai bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas tata kelola fiskal.

Beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa daerah dengan proporsi belanja pegawai melebihi batas ideal memiliki ruang fiskal yang semakin sempit. Penelitian Rahmawati dan Arifin (2022) menunjukkan bahwa tingginya Belanja Pegawai berdampak negatif terhadap belanja modal dan menghalangi daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik. Hal serupa ditemukan oleh Lestari (2023) yang menegaskan bahwa ketidakseimbangan belanja pegawai dapat mempengaruhi kualitas layanan publik dan memperlambat capaian pembangunan daerah. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa evaluasi struktur belanja pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang mendesak.

Dalam konteks Sorong Selatan, analisis terhadap proporsi Belanja Pegawai dalam APBD 2025 menjadi penting karena daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kebutuhan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan membutuhkan porsi belanja yang signifikan agar dampaknya dirasakan masyarakat. Jika belanja pegawai terlalu mendominasi, maka kemampuan daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik akan terbatas. Oleh karena itu, evaluasi ini diperlukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai apakah struktur belanja daerah sudah sesuai standar kesehatan fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah penyusunan rekomendasi perbaikan struktur belanja daerah melalui strategi peningkatan efisiensi belanja pegawai, perbaikan perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), serta optimalisasi belanja publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori *public financial management* yang menekankan pentingnya keselarasan antara input anggaran dan outcome pembangunan (Allen & Tommasi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengangkat fokus pada **evaluasi proporsi Belanja Pegawai terhadap standar kesehatan fiskal daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025**. Penelitian ini tidak hanya memberikan analisis proporsi belanja, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penganggaran di masa mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proporsi belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025, mengevaluasi kesesuaian proporsi belanja pegawai dengan standar kesehatan fiskal nasional, mengidentifikasi implikasi proporsi belanja pegawai terhadap ruang fiskal daerah dan merumuskan strategi perbaikan struktur belanja untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan fiskal.

Penelitian ini menawarkan *novelty* berupa pendekatan evaluatif yang mengintegrasikan standar kesehatan fiskal nasional dengan konteks kebutuhan pembangunan daerah di Sorong Selatan. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis efisiensi belanja pegawai dan optimalisasi belanja publik, yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya pada konteks daerah Papua Barat Daya.

B. Kajian Teori

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan komponen belanja dalam APBD yang digunakan untuk membiayai kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan tambahan, honorarium, serta pembayaran lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan (Kemenkeu, 2023). Menurut Saefulloh (2018), Belanja Pegawai termasuk belanja yang bersifat rutin atau operasional sehingga proporsinya cenderung tetap dan memiliki tingkat fleksibilitas yang rendah. Hal ini menyebabkan komponen tersebut sering kali mendominasi struktur belanja pemerintah daerah, terutama pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas (Firdaus & Tutupoho, 2022; Hapsah, 2022; Mulyana et al., 2023; Setiawan et al., 2023; Widiyarta et al., 2020).

Secara teoretis, tingginya proporsi Belanja Pegawai dapat mengurangi ruang fiskal (*fiscal space*) karena belanja tersebut bersifat wajib dan mengikat. Dalam perspektif *public expenditure management*, belanja pegawai idealnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tidak melebihi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan fiskal (Mikesell, 2014). Dengan demikian, pengendalian proporsi Belanja Pegawai menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan fiskal daerah.

2. Kesehatan Fiskal Daerah

Kesehatan fiskal (*fiscal health*) merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan prioritas pembangunan (Anwar et al., 2025). Pemerintah daerah dianggap memiliki kesehatan fiskal yang baik apabila komposisi belanjanya seimbang, tingkat ketergantungan pada transfer pusat rendah, serta memiliki ruang fiskal memadai untuk mendanai belanja publik yang produktif.

Menurut Auerbach dan Gale (2019), kesehatan fiskal juga diukur melalui kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan utang dalam jangka panjang. Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia,

indikator kesehatan fiskal telah dirumuskan dalam berbagai standar oleh Kementerian Keuangan, antara lain batas ideal proporsi Belanja Pegawai terhadap total belanja yang berkisar antara 30–35 persen. Ketidaksesuaian proporsi belanja dengan standar tersebut dapat menyebabkan risiko fiskal, seperti berkurangnya alokasi belanja modal dan terhambatnya program pembangunan.

3. Ruang Fiskal (*Fiscal Space*)

Ruang fiskal merupakan kapasitas anggaran yang dimiliki pemerintah untuk membiayai program pembangunan setelah memenuhi kewajiban belanja wajib dan mengikat. Menurut Heller (2005), ruang fiskal berhubungan dengan fleksibilitas anggaran yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran publik tanpa menimbulkan risiko fiskal. Pada pemerintah daerah, ruang fiskal sangat dipengaruhi oleh besarnya proporsi Belanja Pegawai; semakin besar proporsi belanja pegawai, semakin kecil ruang yang tersedia bagi belanja publik yang bersifat produktif.

Konsep ruang fiskal menjadi penting dalam menganalisis struktur APBD karena daerah dengan ruang fiskal sempit cenderung sulit meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini banyak dialami oleh daerah dengan beban pegawai yang tinggi atau ketergantungan pada dana transfer pusat.

4. Efisiensi Belanja Publik

Efisiensi belanja publik (*public expenditure efficiency*) secara teoretis mengacu pada kemampuan pemerintah memaksimalkan output dan outcome dari setiap pengeluaran yang dilakukan (Allen & Tommasi, 2020). Belanja yang efisien adalah belanja yang memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja pegawai, sebagai belanja operasional, idealnya harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan produktivitas ASN agar belanja tersebut tidak menjadi beban fiskal.

Dalam konteks Indonesia, penelitian Saefulloh (2018) menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara belanja pegawai dan belanja modal menandakan rendahnya efisiensi belanja publik. Sementara itu, Anwar et al. (2025) menyebutkan bahwa kondisi fiskal yang tidak sehat dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

5. Teori Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*)

Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan pengelolaan anggaran yang menghubungkan alokasi sumber daya dengan kinerja yang diharapkan dari program atau kegiatan pemerintah. Menurut Robinson (2016), pendekatan ini menekankan bahwa setiap belanja pemerintah harus dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Melalui penganggaran berbasis kinerja, pemerintah dapat mengidentifikasi apakah belanja pegawai telah mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi aparatur.

Pada pemerintah daerah, model ini memiliki relevansi yang tinggi karena dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proporsi belanja pegawai sudah sejalan dengan beban kerja, kebutuhan organisasi perangkat daerah, serta capaian layanan publik.

6. Ketidaksesuaian Teori dan Fakta sebagai Dasar Analisis

Kajian teori memberikan gambaran ideal mengenai bagaimana struktur belanja daerah seharusnya disusun, termasuk batas proporsi belanja pegawai, indikator kesehatan fiskal, dan prinsip efisiensi belanja publik. Namun, dalam praktiknya,

ketidaksesuaian antara teori dan kondisi nyata di lapangan sering kali terjadi. Menurut Anwar et al. (2025), gap antara teori dan realitas fiskal daerah dapat menjadi dasar analisis penting untuk menjelaskan akar permasalahan dan merumuskan solusi kebijakan.

Dalam konteks Sorong Selatan, potensi ketidaksesuaian dapat muncul apabila proporsi Belanja Pegawai dalam APBD 2025 lebih tinggi dari batas ideal, ruang fiskal terbatas, atau efisiensi belanja publik rendah. Kondisi ini akan menjadi fokus utama dalam analisis pada bagian pembahasan penelitian.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan kondisi proporsi Belanja Pegawai dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025 dan mengevaluasinya berdasarkan standar kesehatan fiskal nasional. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menampilkan fakta sebagaimana adanya dan memberikan interpretasi yang sistematis terhadap data fiskal yang dianalisis (Creswell, 2015). Desain penelitian menggunakan analisis dokumen (*document analysis*) terhadap dokumen keuangan daerah, terutama APBD Tahun Anggaran 2025. Analisis dokumen digunakan untuk mengidentifikasi komposisi belanja, proporsi belanja pegawai, serta indikator kesehatan fiskal yang relevan. Selain itu, penelitian juga menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan proporsi Belanja Pegawai dalam APBD dengan standar ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Instrumen penelitian yang digunakan mencakup lembar analisis dokumen untuk mengkaji struktur belanja daerah serta mencatat proporsi Belanja Pegawai dan indikator kesehatan fiskal. Selain itu, digunakan formulir perhitungan proporsi Belanja Pegawai yang memuat data total Belanja Pegawai (BP) dan total Belanja Daerah (BD), dengan perhitungan proporsi menggunakan rumus $BP/BD \times 100$ persen. Penilaian kesehatan fiskal dilakukan melalui matriks evaluasi berdasarkan standar Kementerian Keuangan, yang menetapkan kategori kesehatan fiskal ideal pada kisaran 30–35 persen. Seluruh data bersumber dari dokumen resmi APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2025 dan diolah oleh peneliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025 serta studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teoritis dari buku, jurnal, laporan pemerintah, dan publikasi ilmiah yang relevan. Analisis data meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan struktur APBD dan komposisi Belanja Pegawai dalam bentuk tabel dan grafik, analisis proporsi Belanja Pegawai dengan membandingkan hasil perhitungan terhadap standar kesehatan fiskal, serta analisis kesehatan fiskal daerah dengan kategori sehat (30–35 persen), kurang sehat (di atas 35 persen), dan tidak sehat (di atas 40 persen). Selain itu, analisis komparatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara teori kesehatan fiskal dan kondisi empiris APBD Kabupaten Sorong Selatan sebagai dasar pembahasan dan penilaian ruang fiskal daerah.

D. Hasil Dan Pembahasan

a. Hasil

Bagian hasil penelitian disusun untuk menjawab seluruh rumusan masalah, yaitu: (1) proporsi Belanja Pegawai dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025, (2)

kesesuaiannya dengan standar kesehatan fiskal nasional, serta (3) implikasinya terhadap ruang fiskal daerah.

Data hasil analisis diperoleh dari dokumen resmi APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil ekstraksi data APBD, diperoleh komponen sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025

| Komponen Belanja | Nilai (Rp) | Persentase (%) |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Belanja Pegawai | 374.724.230.653,00 | 41 % |
| Belanja Barang dan Jasa | 216.875.948.605,00 | 24 % |
| Belanja Modal | 117.443.813.557,00 | 13 % |
| Belanja Tak Terduga | 6.510.291.200,00 | 1 % |
| Belanja Transfer | 146.299.066.400,00 | 16 % |
| Belanja Hibah | 43.022.121.488,00 | 5 % |
| Belanja Bantuan Sosial | 9.663.777.670,00 | 1 % |
| Total Belanja Daerah | 914.539.249.573,00 | 100% |

Sumber: Diolah Peneliti (2025).

Berdasarkan Tabel 1, perhitungan proporsi Belanja Pegawai dilakukan menggunakan rumus:

$$\text{Proporsi Belanja Pegawai (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Pegawai}}{\text{Total belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belanja Pegawai = Rp 374.724.230.653,00

Total Belanja Daerah = Rp 914.539.249.573,00

Maka:

$$\frac{374.724.230.653,00}{914.539.249.573,00} \times 100\% = 41 \%$$

Nilai tersebut selanjutnya dikategorikan berdasarkan standar kesehatan fiskal Nasional (Kemenkeu, 2023).

b. Pembahasan

1. Analisis Proporsi Belanja Pegawai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada Tahun Anggaran 2025 berada pada kisaran ± 41 persen dari total belanja daerah. Angka ini secara jelas melampaui standar ideal kesehatan fiskal daerah yang secara nasional berada pada rentang 30–35 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur APBD Kabupaten Sorong Selatan masih didominasi oleh belanja yang bersifat rutin dan wajib, khususnya untuk membiayai kebutuhan aparatur sipil negara, seperti gaji, tunjangan, dan belanja pegawai lainnya.

Tingginya proporsi belanja pegawai ini mencerminkan adanya tekanan fiskal yang sangat besar terhadap kapasitas keuangan daerah. Ketika sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan

masyarakat menjadi semakin terbatas. Menurut Saefulloh (2018), dominasi belanja pegawai berpotensi mengurangi fleksibilitas anggaran dan meningkatkan tingkat *fiscal rigidity* pada pemerintah daerah, yaitu kondisi ketika anggaran sulit disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Anwar et al. (2025) yang menjelaskan bahwa belanja rutin yang terlalu dominan dalam struktur APBD dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja produktif, seperti belanja modal dan belanja pelayanan publik. Dengan demikian, tingginya proporsi belanja pegawai di Kabupaten Sorong Selatan tidak hanya menjadi indikator kurang sehatnya kondisi fiskal, tetapi juga mencerminkan tantangan serius dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

2. Kesesuaian dengan Standar Kesehatan Fiskal

Berdasarkan standar kesehatan fiskal daerah, proporsi belanja pegawai yang melampaui batas ideal menunjukkan bahwa struktur belanja Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025 dapat dikategorikan dalam kondisi tidak sehat. Ketidakesesuaian ini menggambarkan belum optimalnya komposisi belanja daerah, di mana belanja pegawai masih menjadi komponen dominan dibandingkan belanja pembangunan dan belanja publik lainnya yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya pembenahan yang sistematis dalam pengelolaan belanja daerah. Optimalisasi formasi aparatur sipil negara menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa jumlah dan kompetensi pegawai benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik. Selain itu, evaluasi terhadap kebutuhan pegawai perlu dilakukan secara berkala guna mencegah pembengkakan belanja pegawai yang tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur.

Penguatan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) juga menjadi hal yang sangat penting. Melalui pendekatan ini, alokasi belanja pegawai tidak hanya didasarkan pada kebutuhan administratif semata, tetapi juga dikaitkan dengan capaian kinerja yang terukur dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah. Penelitian Lestari (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan proporsi belanja pegawai yang tinggi cenderung memiliki belanja modal yang rendah, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa ketidakseimbangan struktur belanja dapat berimplikasi langsung terhadap kualitas pembangunan daerah.

3. Implikasi terhadap Ruang Fiskal Daerah

Tingginya proporsi Belanja Pegawai dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025 membawa implikasi yang signifikan terhadap ruang fiskal daerah. Pertama, kondisi ini menyebabkan terbatasnya ruang fiskal yang tersedia untuk pembiayaan belanja modal dan belanja publik produktif. Akibatnya, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam membiayai program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kedua, dominasi belanja pegawai berdampak pada penurunan kualitas belanja daerah. Alokasi anggaran yang lebih banyak terserap oleh belanja non-produktif berpotensi menghalangi pencapaian target pembangunan daerah secara optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan efektivitas penggunaan APBD sebagai instrumen utama pembangunan daerah.

Ketiga, tingginya belanja pegawai juga mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan pelayanan dasar masyarakat secara cepat dan tepat. Ketika ruang fiskal semakin sempit, pemerintah daerah menjadi kurang fleksibel dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor prioritas yang mendesak. Menurut Heller (2005), ruang fiskal akan semakin terbatas ketika belanja wajib mendominasi APBD. Fenomena ini tercermin dalam struktur APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025 yang menunjukkan dominasi belanja pegawai sebagai komponen belanja terbesar.

4. Kontradiksi Teori dan Fakta

Dalam teori kesehatan fiskal daerah, belanja pegawai seharusnya dijaga agar tetap berada dalam batas proporsional dan tidak mendominasi struktur APBD. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membiayai belanja pembangunan dan pelayanan publik. Namun, fakta empiris di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase belanja pegawai sangat tinggi dan melampaui batas ideal yang direkomendasikan.

Ketidaksesuaian antara teori dan fakta lapangan ini menjadi dasar penting dalam analisis bahwa diperlukan perbaikan kebijakan penganggaran daerah secara menyeluruh. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain rasionalisasi belanja pegawai melalui pengendalian jumlah dan komposisi aparatur, penataan struktur organisasi perangkat daerah agar lebih efisien dan fungsional, serta optimalisasi penerapan anggaran berbasis kinerja untuk memastikan keterkaitan antara belanja dan capaian hasil.

Selain itu, penguatan disiplin aparatur sipil negara juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai. Dengan meningkatnya produktivitas aparatur, belanja pegawai yang besar diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang sebanding terhadap kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori kesehatan fiskal dan realitas pengelolaan APBD di Kabupaten Sorong Selatan.

E. Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, proporsi belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2025 terbukti melebihi batas ideal nasional sebesar 30-35 persen dari total belanja daerah, yang menunjukkan dominasi belanja rutin dan konsumtif serta ketergantungan pada struktur aparatur yang relatif gemuk. Kondisi ini menyebabkan struktur belanja daerah berada pada kategori kesehatan fiskal yang tidak sehat karena alokasi belanja modal dan belanja pembangunan menjadi terbatas, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi jangka menengah maupun panjang menjadi kurang optimal. Tingginya belanja pegawai juga berdampak pada menyempitnya ruang fiskal dan

menurunnya fleksibilitas anggaran, yang membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan publik yang mendesak, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar dan belanja publik produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui efisiensi belanja pegawai, penataan kebutuhan dan rekrutmen aparatur secara rasional, optimalisasi sumber daya manusia, serta penerapan anggaran berbasis kinerja agar struktur APBD ke depan menjadi lebih seimbang, sehat secara fiskal, dan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

F. Ucapan Terima Kasih dan Saran (Jika ada)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Keuangan Daerah, serta instansi lain yang telah menyediakan data APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak akademisi yang memberikan masukan selama proses penyusunan jurnal ini. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada akses data sekunder yang bersifat agregat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan analisis mikro terhadap efisiensi kinerja ASN, serta menghubungkan struktur belanja pegawai dengan kualitas layanan publik di tingkat organisasi perangkat daerah.

Daftar Pustaka

- Allen, R., & Tommasi, D. (2020). *Managing public expenditure*. Oxford University Press.
- Anwar, M., Yusuf, H., & Rahim, A. (2025). *Fiscal health evaluation in local government budgeting*. *Journal of Public Finance*, 12(1), 45–58.
- Auerbach, A., & Gale, W. (2019). *Fiscal sustainability and government spending*. Brookings Institution.
- Creswell, J. W. (2015). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Firdaus, R., & Tutupoho, R. R. (2022). Teknologi Crowdfunding dalam Kegiatan Penggalangan Dana Sosial Berbasis Internet di Indonesia (Studi Pada Situs Kitabisa.com). In *Jurnal Administrasi Profesional* (Vol. 3, Issue 1, pp. 66–73). Politeknik Negeri Jakarta. <https://doi.org/10.32722/jap.v3i1.4963>
- Hapsah, S. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Manajemen Administrasi Sekolah. *Seri Publikasi Pembelajaran : Manajemen Administrasi Sekolah*, 1(1).
- Heller, P. (2005). Understanding fiscal space. *IMF Policy Discussion Paper*, 5(4), 1–20.
- Lestari, F. (2023). The effect of personnel expenditure on regional development outcomes. *Journal of Regional Economics*, 18(2), 77–89.
- Mikesell, J. (2014). *Fiscal administration*. Cengage Learning.
- Mulyana, Y., Diana, B. A., Harta, R., & Andri, Y. (2023). Strategi kebijakan penataan infrastruktur ibu kota baru (studi kasus di kabupaten penajam paser utara). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.8324>
- Saefulloh, A. (2018). Analisis belanja pegawai dan dampaknya terhadap belanja modal daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 3(1), 12–25.
- Setiawan, F., Saefulloh, A., & Nasution, R. P. S. (2023). Administratio. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14(2), 113–122.
- Widiyarta, A., Robbani, H. I., & Windiastuti, C. E. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pelayanan Administrasi (Siola) Di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. In *Public Administration Journal of Research* (Vol. 2, Issue 3). University of Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i3.52>